

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018).
- Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020).
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005).
- Citra Hennida, et al., *Respons Negara dan Institusi Global terhadap COVID-19*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020).
- Dina Susiani, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, (Jember: Pustaka Abadi, 2019).
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 2011).
- Eko Adi Susanto dan Gunarto, "Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP," *Jurnal Daulat Hukum* 1 (Maret 2018).
- Eng Fadly Usman, et al., *Proyeksi, Prediksi dan Realita dalam Perencanaan di Era Pandemi COVID-19*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2022).
- Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Jakarta: Guepedia, 2019).
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2020).
- Febby Mutiara Nelson, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Rajawali Pers, 2022).
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010).

- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel Press, 2019).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*, (Bogor: Guepedia, 2018).
- La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2023).
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Mochamad Faishal Hafizh, et al., "Role of Criminal Law in Falsification of COVID-19 Vaccine Certificates," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8 (Agustus 2022).
- Muhammad Iqbal, et al., *Hukum Pidana*, (Tangerang: UNPAM Press, 2019).
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020).
- P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2020).
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991).
- Rafiqoh Lubis, *Tindak Pidana Khusus*, (Medan: USU Press, 2023).

Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, (Makassar: CV Social Politic Genius (SIGn), 2020).

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023).

Umar Anwar, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Vika Zeny A., et al., *Kacamata Hukum: Analisa Kebijakan Masa Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Guepedia, 2020).

Yeni Widowati, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2007).

## **B. Karya Ilmiah**

Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1 (Juli 2012).

Anis Rifai, "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pihak yang Menggunakan Dokumen Palsu," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3 (Maret 2022).

Aras Firdaus dan Rudy Hendra Pakpahan, "Kebijakan Hukum Pidana sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19," *Majalah Hukum Nasional* 50 (Desember 2020).

Dany Ghufro dan Piatur Pangaribuan, "Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Pemalsuan Polymerase Chain Reaction (PCR)," *Journal de Facto* 9 (Januari 2023).

Edwardus Iwantri Goma, "Dampak COVID-19 terhadap Isu Kependudukan di Indonesia," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 5 (Juni 2021).

Eva Zulfa, "Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapannya)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (Juni 2018).

I Kadek Candra Karunia Bagiarta Putra, et al., "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Rapid Test di Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Preferensi Hukum* 2 (November 2021).

I Wayan Putu Sucana Aryana, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Negatif COVID-19," *Jurnal Yustitia* 14 (Mei 2020).

Indah Novianti, “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Surat Hasil Swab Tes PCR COVID-19 sebagai Syarat Perjalanan,” *Jurist-Diction* 5 (September 2022).

Katrin Valencia Fardha, “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3 (September 2023).

Nyoman Gede Remaja, “Makna Hukum dan Kepastian Hukum,” *Kertha Widya* 2 (Agustus 2014).

Rani Nur Isnaini, “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Vaksin COVID-19,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2 (Desember 2022).

Teerza Febe Jennifer, “Kebijakan Hukum Pidana Non-Penal dalam Menanggulangi Perbuatan Pidana Pemalsuan Surat Bebas Corona Virus Disease 2019,” *Jurnal Hukum Adigama* 4 (Desember 2021).

### **C. Peraturan Perundangan-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek van Strafrecht*], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU Nomor 36 Tahun 2009, LN No. 144, TLN No. 5063.

Indonesia, *Undang-Undang Kejarantinaan Kesehatan*, UU Nomor 6 Tahun 2018, LN No. 128, TLN No. 6236.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, PP Nomor 21 Tahun 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 398/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 30 Desember 2021.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 399/Pid.B/2021/PN Bna tanggal 2 Februari 2022

### **D. Sumber Lain**

Agus Setyadi, “Dibayar Rp 10 Ribu untuk Palsukan Surat COVID, Pria Aceh Dihukum 2 Tahun Bui,” <https://news.detik.com/>, diunduh 7 Agustus 2023.

Allianz, “Yuk, Pahami Lebih Jelas Arti Pandemi pada COVID-19,” <https://www.allianz.co.id/>, diunduh 5 Mei 2023.

- Erizka Permatasari, “Awat! Ini Jerat Pidana Pemakai Kartu Vaksin dan Hasil Tes COVID-19 Palsu,” <https://www.hukumonline.com/>, diunduh 5 Januari 2024.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Komorbid Jadi Penyebab Terbanyak Kematian Pasien COVID-19,” <https://www.kemkes.go.id/>, diunduh 16 April 2023.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19,” <https://www.kemkes.go.id/>, diunduh 8 April 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Kajian Dampak COVID-19 Terhadap Pasar Tenaga Kerja dan Respons Kebijakan di Kawasan Asia dan Pasifik,” <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>, diunduh 11 Oktober 2023.
- Rahajeng Kusumo Hastuti, “Satgas COVID-19: Tes PCR Palsu Bisa Timbulkan Korban Jiwa,” <https://www.cnbcindonesia.com/>, diunduh 12 Desember 2023.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, “Situasi COVID-19 di Indonesia (Update per 14 Januari 2023),” <https://covid19.go.id/>, diunduh 14 Mei 2023.
- V. Fridawati, “Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, Apakah Tahu Perbedaannya?,” <https://primayahospital.com/>, diunduh 10 Oktober 2023.